

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT. TAIYOUNG ENGREEN
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
 - b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
 - c. Telpon : 021-8844934
 - d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com
ims@intimultimasertifikasi.com
 - e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
 - f. Tim Audit : 1. Indra Sofian, S Hut (Lead/ Auditor Ekologi)
2. Ir. Enjang Gangga Permana (Auditor Bidang Produksi)
3. Dasep Gunawan, S Hut (Auditor Prasyarat)
4. Eko Nugrahaeni, M Si (Lead/ Auditor Sosial)
5. Eka Prayudha, S.Hut (Auditor VLK)
 - g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HT : PT. Paramitra Mulia Langgeng Blok-III**
- 1. SK IUPHHKA-HT : SK No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009
 - 2. Luas Areal : ± 59.810 Ha
 - 3. Lokasi : Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
 - 4. Alamat Kantor : Jl. Pinus No. 49 RT. 02/XI Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya
 - 1. Telpon : -
 - 2. **Pengurus** :
 - Komisaris : Drs. Sunarko Danu Ardanto
 - Direktur : Drs. Sapto Winardi

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Audit Tahap I	09 November 2015	<p>a. Melakukan verifikasi dokumen.</p> <p>b. Mempelajari kondisi lapangan auditee.</p> <p>c. Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II.</p> <p>d. Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, antara lain berkonsultasi dengan Direktur untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditee.</p> <p>e. Menentukan metodologi penilaian.</p> <p>f. Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II.</p>
2.	Perjalanan Jakarta – Gunung Mas	21 November 2015	Tentatif
3.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 November 2015 (Instansi terkait)	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
4.	Konsultasi Publik	23 November 2015 (Base Camp PT. Taiyoung Engreen)	<p>Konsultasi publik dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Padakeempatan tersebut, kepada masyarakat yang menghadiri diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan masukan kepada tim Auditor tentang kegiatan IUPHHK-HTPT.TYE yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Beberapa informasi dari masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut :</p> <p>a. Agar kegiatan PT.TYE sesuai dengan perencanaan yang diajukan. Praktek penebangan harus diimbangi dengan penanaman sesuai rencana.</p> <p>b. Kewajiban kepada BLH terkait pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan agar dilaporkan secara periodik.</p> <p>c. Ada kepedulian dari perusahaan kepada tokoh desa dan desa sebagai sebuah lembaga dengan memberi kontribusi berupa bantuan sebagai salah satu bentuk CSR kepada desa-desa sekitar. Kerja sama yang baik ditingkatkan antara manajemen PT. TYE dan masyarakat sekitar</p> <p>d. PT.TYE telah mensosialisasikan kegiatan/ program kemitraan dan tanaman kehidupan namun sampai saat ini belum direalisasikan karena permasalahan lokasi yang belum disepakati bersama masyarakat sekitar</p> <p>e. Keberadaan lahan masyarakat untuk kegiatan bertani dalam area kerja PT. TYE merupakan permasalahan yang terus menerus diupayakan diselesaikan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara PT. TYE dan masyarakat.</p>
5.	Pertemuan Pembukaan (entry briefing)	23 November 2015 (Base Camp PT. Taiyoung Engreen)	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara

			utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Entry Briefing
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 30 November 2015 (PT. Taiyoung Engreen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan 2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria. 3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik. 4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang. 5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab 6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
7.	Pertemuan Penutup Exit Briefing	30 November 2015 (Base Camp PT. Taiyoung Engreen)	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak 2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan 3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan 4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara exit briefing
8.	Pengambilan Keputusan	28 Desember 2015	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

2.1 Resume Hasil Penilaian PHPL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
A. Kriteria Prasyarat			
1.1. Baik	1.1.1.	Baik	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT. TYE tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (Akta Notaris No. 86 tanggal 31 Januari 2007, Notaris H. Yunardi, S.H dan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TYE No. 85 tanggal 16 Juni 2015, Notaris/PPAT Diah Sukma Permata Riani, S.H); IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009; Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. TYE periode tahun 2010 – 2019; Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dokumen BKT/RKTUPHHK-HT PT. TYE tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2015; dan administrasi tata batas areal PT. TYE (Pedoman tata batas No. 283/PB/IUPHHK-HT/2012, tanggal 24 April 2012, Instruksi Kerja No. INST.32/BPKH.XXI-3/2013 tanggal 5 Desember 2015 dan Surat Perintah Tugas Pelaksana penataan batas di lapangan)
	1.1.2	Sedang	Rencana penataan batas areal kerja PT. TYE adalah sepanjang \pm 150.746 m. Realisasi tata batas seluruh areal kerja PT. TYE saat ini sedang dalam proses pengukuran dan pemancangan batas di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen-dokumen administrasi tata batas berupa Pedoman tata batas No. 283/PB/IUPHHK-HT/2012, tanggal 24 April 2012, Instruksi Kerja No. INST.32/BPKH.XXI-3/2013 tanggal 5 Desember 2015 dan Surat Perintah Tugas Pelaksana penataan batas di lapangan.
	1.1.3.	Baik	Secara legal eksistensi areal PT. TYE telah diakui oleh pihak pemerintah yang berwenang melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian IUIPHHK-HTI kepada PT. TYE atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 59.810 Hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun pernah terjadi konflik areal dengan masyarakat dan pada beberapa lokasi dalam areal kerja PT. TYE memiliki potensi konflik, namun PT. TYE telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mekanisme sesuai Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 198 Tahun 2011 dan berupaya menurunkan tingkat konflik melalui upaya monitoring terhadap areal yang berpotensi konflik. Berdasarkan hasil konsultasi publik, masyarakat menyatakan bahwa sejak tahun 2013 s/d 2015 tidak terjadi konflik antara PT. TYE dengan masyarakat terkait batas areal.
	1.1.4	Baik	Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. 529/Kpts-II/2012, Tanggal 25 September 2012) terdapat perubahan fungsi sebagian areal PT. TYE menjadi areal dengan fungsi kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 3.371 Ha (5,64%). Areal tersebut sebelumnya merupakan areal dengan fungsi kawasan sebagai Hutan Produksi Tetap (HP). Atas dasar adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT. TYE telah melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.1.5	Sedang	Di dalam areal kerja PT. TYE terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa adanya jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang melintas di dalam areal PT. TYE dan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat. Atas adanya jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tersebut, PT. TYE telah melakukan pendataan dan melaporkan kepada instansi berwenang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya laporan berdasarkan surat Surat Direktur PT. TYE No. 85/TE-HTI/PLK/XI/2015 tanggal 16 November 2015. Sedangkan untuk kegiatan penambangan tanpa izin, PT. TYE belum melakukan pendataan secara detil dan belum melaporkan adanya kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang.
1.2. Sedang	1.2.1	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi PT. TYE yang ditandatangani oleh Direksi pada tanggal 01 Agustus 2015. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu pengelolaan hutan tanaman secara profesional yang menjamin kesinambungan produksi kayu baik kuantitas maupun kualitas yang memadai melalui pencapaian kepastian kawasan hutan, peningkatan produktivitas hutan, pengalokasian hutan lindung dan menjaga keberadaannya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme dalam pemanfaatan hutan tanaman serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kelembagaannya.
	1.2.2	Sedang	Sosialisasi visi dan misi PT. TYE telah dilakukan baik kepada internal karyawan PT. TYE maupun kepada sebagian masyarakat di sekitar areal kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir kegiatan sosialisasi visi dan misi PT. TYE yang dilakukan pada tanggal 1 September 2015. Berdasarkan daftar hadir kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh karyawan dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja (Masyarakat Desa Mangku Baru. Sedangkan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Pilang Munduk dan Desa Tumbang Empas belum pernah dilakukan. Atas dasar hal tersebut, maka kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar areal kerja belum dilakukan secara menyeluruh menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat.
	1.2.3	Sedang	PT. TYE telah berupaya melakukan kegiatan pengelolaan hutan tanaman sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan dan secara umum sebagian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemegang Izin telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dari realisasi pelaksanaan kegiatan penataan batas areal kerja sesuai dengan pedoman dan instruksi kerja yang telah diterbitkan, menyusun dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek, menetapkan alokasi kawasan lindung dan penataan batasnya, merealisasikan rencana peningkatan kompetensi SDM yang dimilikinya melalui pengikutsertaan dalam pendidikan dan latihan, melaksanakan program CSR/CD dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi sesuai visi dan misi tersebut, diantaranya kegiatan penanaman tidak sesuai dengan rencana, kegiatan pemeliharaan yang tidak secara intensif dilakukan dan alokasi tanaman kehidupan sebagai wujud pemenuhan terhadap hak masyarakat sekitar belum direalisasikan. Atas dasar hal tersebut, maka Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi.
1.3	1.3.1.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. TYE bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum memenuhi syarat kecukupan jumlah sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI- SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yaitu kekurangan GANIS PHPL sebanyak 15 (lima belas) orang GANIS PHPL atau 62,50% dari ketentuan yang berlaku yaitu GANIS PHPL Timber Cruising (TC), GANIS PHPL Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), GANIS PHPL Pemanenan Hutan (NENHUT) dan GANIS PHPL Kelola Lingkungan (KELING).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.3.2.	Baik	Realisasi peningkatan SDM PT. TYE periode 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015) melalui pelatihan/diklat GANIS PHPL yang diselenggarakan oleh instansi berwenang terealisasi total sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang atau 109,23% dari total peningkatan kompetensi yang direncanakan pada periode tersebut.
	1.3.3.	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT. TYE tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain dokumen Peraturan Perusahaan Peraturan Perusahaan PT. TYE yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. SK.560/61/DSTKT/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015, Laporan Bulanan Administrasi Umum & Personalialia, Surat Pernyataan Direktur PT. TYE No. 003/TE-HTI/SK/PLK/X/2015 tanggal 1 Agustus 2015 tentang kebebasan berserikat bagi karyawannya, dokumen Kesepakatan Kerja Waktu Tak Tertentu dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, dokumen Surat Perintah Kerja, dokumen Surat Keputusan Direktur terkait penempatan jabatan karyawan pada jabatan tertentu, bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT. TYE sesuai dengan tagihan BPJS Kesehatan pada setiap bulannya dan Struktur organisasi dan job description PT. TYE.
1.4. Baik	1.4.1.	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang termuat dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2010 – 2019 atas nama PT. TYE yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Struktur tersebut telah diimplementasikan di lapangan. Kerangka struktur organisasi PT. TYE dibuat secara detil dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan tanaman. Secara keseluruhan, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial dan bidang lainnya secara berkelanjutan.
	1.4.2.	Baik	Perangkat sistem informasi manajemen PT. TYE yang tersedia diantaranya perangkat keras (Komputer, printer, mesin fotocopy, radio/SSB, Handy Talky, Hardisk dan Flaskdisk, alat telekomunikasi (HP, Modem), kamera, GPS dan Kompas) dan perangkat lunak (struktur organisasi, <i>job description</i> , data base SDM (tenaga kerja) dan <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> seluruh bagian pengelolaan hutan tanaman (bagian Ekologi/lingkungan, pengamanan & perlindungan hutan, perencanaan, produksi dan Sosial, laporan bulanan baik Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman PT. TYE maupun Laporan Bulanan Administrasi Umum & Personalialia). Disamping itu, tersedia tenaga pelaksana SIM PT. TYE sebanyak 102 (seratus dua) orang dengan beragam status karyawan masing masing (Karyawan Tetap, Bulanan Kontrak, Harian Tetap, Harian Kontrak, Harian Lepas, Non Kontrak, Semi Borongan dan Borongan). SDM pelaksana tersebut ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya
	1.4.3	Sedang	Berdasarkan struktur organisasi PT. TYE, Satuan Pengawas Internal/ <i>Internal Auditor</i> bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. TYE tersebut diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. TYE No. 05/TE- HTI/SK/PLK/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015. Tim SPI tersebut telah melakukan kegiatan pemeriksaan/audit/evaluasi terhadap beberapa pekerjaan yang dilakukan secara borongan (kegiatan land clearing, penanaman dan realisasi TPTJ). Namun demikian, Tim SPI tersebut belum dapat mengontrol tahapan kegiatan lainnya di lapangan (tahapan perencanaan, produksi maupun kegiatan pengelolaan lingkungan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.4.4.	Sedang	<p>Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, dilakukan manajemen PT. TYE dengan cara menyusun PT. TYE telah menyusun Prosedur Baku Pelaksanaan kegiatan/Standar Operating Procedure (SOP) pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman dan peraturan perusahaan dengan register dokumen TYE-PL-042-10-001, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Manajer Camp PT. TYE secara langsung setiap hari kerja melalui kegiatan apel/briefing pagi. Disamping itu juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh pengawas/mandor masing-masing bidang dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Direksi PT. TYE. Tindakan perbaikan pada beberapa bagian kegiatan telah dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, bahkan PT. TYE pada tahun ini melakukan pergantian manajemen. Namun masih ada beberapa kegiatan di lapangan yang belum dilakukan perbaikan, salah satunya kegiatan pemeliharaan tanaman belum dilakukan secara intensif dan pencapaian target penanaman yang masih relatif rendah.</p>
1.5 Sedang	1.5.1.	Sedang	<p>Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT. TYE yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HT PT. TYE periode 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2010/BKT, 2011, 2013, 2014 dan 2015) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan alokasi tanaman kehidupan yang merupakan hak masyarakat setempat, PT. TYE telah melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar areal kerjanya (Desa Tumbang Empas, Desa Pilang Munduk dan Desa Tuyun) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sekda Kabupaten Gunung Mas) pada tanggal 15 Pebruari 2013. Namun demikian, belum ditemukan bukti yang menunjukkan PT. TYE melakukan kegiatan sosialisasi terkait adanya hak-hak masyarakat sekitar dalam pembangunan HTI kepada masyarakat Kelurahan Mungku Baru Kota Palangkaraya.</p>
	1.5.2.	Sedang	<p>Penataan batas areal kerja PT. TYE pada saat dilakukan verifikasi sedang dalam proses pengukuran dan pemancangan batas di lapangan yang dilakukan oleh konsultan bersama dengan para pihak terkait (Manajemen PT. TYE, pemerintah (BPKH Wilayah XXI Palangkaraya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangaraya, IUPHHK-HA PT. Hasil Kalimantan Jaya dan perwakilan masyarakat setempat). Pelaksanaan penataan batas tersebut berpedoman pada dokumen pedoman tata batas dan instruksi kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Namun demikian, belum ditemukan bukti dokumen adanya persetujuan dari masyarakat terkait proses penataan batas areal kerja PT. TYE. Belum ditemukan bukti dokumen adanya persetujuan dari masyarakat terkait proses penataan batas areal kerja PT. TYE. Hal ini karena pelaksanaan penataan tata batas belum selesai dilakukan di lapangan, sehingga dokumen Berita Acara pelaksanaan penataan batas yang ditandatangani oleh para pihak belum tersedia.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.5.3.	Baik	Proses penyusunan program CSR/CD PT. TYE dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman baik jangka panjang (RKUHHK-HTI), jangka pendek (RKTUPHHK-HTI) yang telah disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan baik jajaran manajemen PT. TYE, pejabat yang berwenang (pemerintah) maupun masyarakat sekitar sebagai penerima program-program CSR/CD PT. TYE. Walaupun pihak masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR, tetapi berdasarkan bukti kesepakatan hasil musyawarah yang pernah dilakukan dan pelaksanaan program CSR/CD yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program CSR dari PT. TYE, menunjukkan bahwa masyarakat telah menyetujui program CSR/CD yang dilaksanakan oleh PT. TYE.
	1.5.4	Sedang	Proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT. TYE dituangkan dalam dokumen baik Deliniasi Mikro, dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Dokumen perencanaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (pemerintah). Pada pelaksanaannya, Direksi IUPHHK-HTI PT. TYE menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TYE No. No. 129/TE-HTI/KEP/PLK/XII/2013 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lindung pada Areal IUPHHK-HTI PT. TYE di Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. Disamping itu, PT. TYE telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada sebagian masyarakat setempat (masyarakat Desa Tumbang Empas), sedangkan untuk masyarakat desa lainnya (Desa Pilang Munduk dan Desa Mangku Baru belum dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung diperoleh dari beberapa pihak yaitu manajemen PT. TYE, Pemerintah dan sebagian masyarakat desa setempat.
B. Kriteria Produksi			
2.1. Baik	2.1.1	Baik	PT. TYE telah memiliki RKUPHHK dengan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui surat No. SK Menhut No. SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012, dimana penyusunan penataan areal kerjanya telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro.
	2.1.2.	Sedang	Terdapat kesesuaian antara penempatan blok BKT/RKT (2010 s/d 2015) dengan yang telah direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019. Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruh blok RKT yang telah direncanakan dalam Peta RKUPHHK-HTI periode 2010 – 2019 diajukan dalam usulan RKT, karena pada setiap rencana RKT terdapat luncuran (carry over) dari blok RKT sebelumnya.
	2.1.3	Baik	Batas blok/petak kerja di lapangan sebagian besar berupa jalan (jalan blok, jalan cabang, jalan utama), dan sebagian berupa penandaan dengan cat pada pohon-pohon sepanjang batas petak. Selain itu, dilakukan juga pemasangan pal batas Blok/petak berupa kayu berukuran 10 cm x 10 cm dengan cat warna kuning-hitam bertuliskan ID_Blok dan ID_Petak yang dipasang pada setiap pojok batas petak.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
2.2 Buruk	2.2.1	Sedang	<p>PT. TYE memiliki 3 tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan alam tanah kering, ekosistem hutan alam tanah rawa, dan ekosistem hutan tanaman pada tanah kering.</p> <p>PT. TYE hanya memiliki data potensi tegakan pada hutan alam tanah kering berdasarkan hasil IHMB tahun 2010, yang didalamnya tidak ada pemisahan antara ekosistem hutan tanah kering dengan ekosistem hutan rawa.</p> <p>Selain data potensi tegakan pada hutan alam tanah kering berdasarkan hasil IHMB, PT. TYE juga memiliki data potensi tegakan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) untuk Blok BKT 2010, RKT 2011, RKT 2014, dan RKT 2015.</p> <p>Sedangkan pada hutan tanaman tidak dilakukan kegiatan inventarisasi tegakan, karena kondisi tanaman yang tidak normal dan direncanakan akan dilakukan re-planting, sehingga PT. TYE tidak memiliki data potensi tegakan pada ekosistem hutan tanaman.</p>
	2.2.2.	Buruk	<p>Tidak memiliki data hasil pengukuran riap tegakan untuk ekosistem hutan alam, namun telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan untuk selama 5 tahun untuk tegakan hutan tanaman, namun belum dianalisis sampai kepada perhitungan riap volume.</p>
	2.2.3	Sedang	<p>Tidak memiliki data hasil pengukuran riap tegakan untuk ekosistem hutan alam, namun telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan untuk selama 5 tahun untuk tegakan hutan tanaman, walaupun belum dianalisis sampai kepada perhitungan riap volume, namun sudah ada upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir</p>
2.3 Sedang	2.3.1	Sedang	<p>UM telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur namun tidak lengkap untuk seluruh sistem silvikultur yang diterapkan, dan terdapat beberapa SOP yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis.</p>
	2.3.2	Sedang	<p>Dengan adanya beberapa SOP yang tidak memisahkan antara sistem silvikultur THPB dengan sistem silvikultur TPTJ, seperti pada SOP Inventarisasi ; SOP yang secara teknis tidak sesuai dengan sistem silvikultur THPB maupun TPTJ dan tidak mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, seperti halnya SOP Penyiapan lahan dan SOP Produksi (Pemanenan), maka SOP-SOP tersebut secara teknis akan berbeda implementasinya dengan fakta di lapangan.</p>
	2.3.3.	N/A	<p>Ketiadaan data potensi tegakan untuk hutan tanaman, salah satu alasannya adalah karena ketidaknormalan pertumbuhan tanaman tahun 2010 s/d 2013, yang tidak prospektif sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel verifier 2.2.1, yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran riap pada PUP dan uji petik pada tanaman tahun 2010 dan 2011 yang menunjukkan rendahnya pertumbuhan tanaman tersebut.</p> <p>Sehingga kemudian melahirkan kebijakan dari manajemen PT. TYE untuk melakukan RE-PLANTING terhadap SELURUH tanaman yang ada (yang sudah ditanam), untuk menunjang Business Plan PT. TYE dalam 5 tahun mendatang.</p> <p>Sebagaimana dinyatakan pula di dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT. TYE Periode 2010 – 2019, bahwa kelas perusahaan hutan tanaman yang dibangun adalah kelas perusahaan “kayu pertukangan” dengan daur tanaman 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan tanaman tertua yang ada di PT. TYE adalah tanaman tahun 2010 (Kelas Umur V), yang berarti belum terkategori sebelum masak tebang apabila pendekatan kategori masak tebangnya adalah tanaman dengan umur 9 – 10 tahun (KU-IX, KU-X).</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	2.3.4	N/A	Ketiadaan data potensi tegakan untuk hutan tanaman, salah satu alasannya adalah karena ketidaknormalan pertumbuhan tanaman tahun 2010 s/d 2013, yang tidak prospektif sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel verifier 2.2.1, yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran riap pada PUP dan uji petik pada tanaman tahun 2010 dan 2011 yang menunjukkan rendahnya pertumbuhan tanaman tersebut. Sehingga kemudian melahirkan kebijakan dari manajemen PT. TYE untuk melakukan RE-PLANTING terhadap SELURUH tanaman yang ada (yang sudah ditanam), untuk menunjang Business Plan PT. TYE dalam 5 tahun mendatang.
2.4. Sedang	2.4.1.	Sedang	PT. TYE telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan dengan tujuan untuk menekan dampak yang ditimbulkan sekecil mungkin akibat kegiatan pemanenan kayu, untuk tahap pra operasi penebangan maupun tahap operasi penebangan dan tahap pasca operasi penebangan, tetapi isinya belum sesuai (minimal 50%) dengan karakteristik kondisi setempat.
	2.4.2	Baik	Telah ditetapkan zonasi areal yang bisa dimanfaatkan/ditanami/dipanen dan areal konservasi serta areal untuk sarana-prasrana pengelolaan hutan tanaman. Zonasi areal telah diimplementasikan dalam kegiatan penataan areal kerja (PAK), dan realisasi penataan areal kerja tersebut kemudian dipetakan ke dalam peta kerja PAK. Pada tahap kegiatan penebangan, pihak UM juga telah menerapkan teknologi penebangan dengan menggunakan alat-alat mekanis baik pada proses penebangan, penyaradan, maupun pengangkutan. Sedangkan pada tahap pasca penebangan, PT. TYE telah melaksanakan kegiatan penyiapan lahan, pengadaan bibit, dan penanaman. Kegiatan penyiapan lahan dilakukannya tanpa bakar, namun dengan melakukan penumpukan batang/kayu dan sisa tebasan searah kontur sebagai jalur bersih (sesuai jarak tanam).
	2.4.3	Sedang	Faktor Eksploitasi (Fe) untuk penebangan penyiapan lahan pada hutan alam dengan sistem silvikultur THPB adalah (rata-rata) sebesar 0,63.
2.5	2.5.1	Baik	PT. TYE memiliki dokumen RKT sejak Tahun 2010 s/d 2015 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI periode 2010-2019 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	2.5.2	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.4	Sedang	Realisasi volume tebangan dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6 Buruk	2.6.1	Buruk	PT. TYE tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk selama periode 2010 s/d 2014.
	2.6.2.	Buruk	PT. TYE tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk selama periode 2010 s/d 2014.
	2.6.3.	Buruk	Proporsi persentase realisasi biaya terbesar adalah kegiatan penyiapan lahan yakni sebesar 88,7% ; dan proporsi persentase realisasi biaya terkecil adalah untuk kegiatan pemeliharaan tanaman yakni sebesar 7,7%, sehingga perbedaan proporsi sebesar 81%.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	2.6.4.	Buruk	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, realisasi anggaran kegiatan ada namun tidak lancar. Hal tersebut terbukti dengan realisasi fisik pada beberapa kegiatan pembangunan hutan tanaman, seperti realisasi penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.
	2.6.5.	Sedang	Total realisasi biaya penanaman (tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan) tahun 2011 s/d 2014 adalah sebesar 81,81%.
	2.6.6.	Buruk	Pencapaian realisasi fisik penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh PT. TYE < 50% dari yang seharusnya.
C. Kriteria Ekologi			
3.1 Baik	3.1.1.	Baik	Penentuan jenis dan luas kawasan lindung PT. TYE melalui beberapa proses kajian. Dimulai dari penyusunan dokumen AMDAL tahun 2009, penyusunan dokumen Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro 2009 tahun dan 2010. Kajian kriteria kawasan berdasar deliniasi mikro disimpulkan bahwa di areal kajian memenuhi syarat untuk beberapa kawasan lindung yaitu 1). KPPN; 2). KPSL dan 3). Sempadan Sungai. Hasil kajian kesesuaian kawasan lindung ini kemudian diadopsi ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang perusahaan yaitu dokumen RKUPHHK-HT PT. TYE yang disusun tahun 2012. Selanjutnya, jenis dan luas kawasan lindung tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur PT. TYE No 129 /TE- HTI/KEP/PLK/XII/2013. Selain sesuai dengan kondisi biofisiknya, jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku.
	3.1.2	Sedang	Kawasan lindung PT. TTYE yang mudah mendapat gangguan dikarenakan aksesnya terbuka seluas 3.107 ha. Realisasi penataan batas sampai dengan tahun 2015 mencapai 2.642 ha atau setara dengan 85,03 %. Hasil observasi lapangan ditemukan fakta audit pelaksanaan penandaan kawasan lindung KPPN dan sepadan Sungai Rakumpit dan Rresum berupa papan nama kawasan dan papan nama himbauan untuk tidak merusak ekosistemnya serta tanda batas berupa cat merah dan kuning yang disematkan pada batang pohon.
	3.1.3	Baik	Sebagian kecil kawasan lindung PT. TYE tidak berhutan (berupa belukar tua dan muda serta tanah terbuka). Adapun yang masih berhutan mencapai 4.931,82 ha dari 6.009 luasan total atau setara dengan 82,07 %. Tanda-tanda gangguan yang ditemukan selama verifikasi lapangan berupa bekas kebakaran dan klaim masyarakat atas areal di KPPN.
	3.1.4	Sedang	Berdasarkan hasil telaah dokumen terkait bukti pengakuan atas kawasan lindung PT. TYE ditemukan bukti fakta audit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan kawasan lindung oleh pemerintah yaitu dengan disahkannya dokumen rencana panajng (RKUPHHK) dan dokumen rencana jangka pendek (RKTUPHHK PT. TYE. 2. Pengakuan oleh manajemen PT. TYE dibuktikan dengan dikukukannya kawasan lindung melalui Surat Keputusan Direktur PT. TYE No 129 /TE-HTI/KEP/PLK/XII/2013 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Pada areal IUPHHK-HTI PT. TYE dan tindak kelola berupa penandaan kawasan. 3. Pengakuan oleh sebagian masyarakat kampung sekitar areal yaitu Kampung Tumbang Empas. Sedangkan bukti pengakuan dari masyarakat Kampung Pilang Munduk dan Tuyun tidak tersedia.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.1.5	sedang	Dokumen Laporan Pemantauan Dampak Lingkungan yang tersedia belum menyajikan data autentik tindak kelola kawasan lindung yang telah dilakukan Pemegang Izin. Adapun laporan yang telah disusun berupa hasil kelola kawasan lindung yaitu Berita Acara Pemeriksaan pelaksanaan pemasangan papan nama kawasan lindung KPPN dan penataannya serta pemasangan papan nama dan penataan kawasan lindung sempadan Sungai Resum dan Sungai Rakumpit. Sedangkan kewajiban kelola kawasan lindung yang belum terlaksana adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Areal KPPN belum diinventori potensi jenis flora dan fauna penyusunnya. - Penandaan (papan nama dan tanda batas) untuk kawasan lindung KPSL. - Survey potensi kekayaan fauna di areal KPSL.
3.2 Baik	3.2.1	Baik	PT. TYE telah menyusun dokumen-dokumen prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan potensi gangguan yang ada yaitu terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Standard Operating Prosedurs (SOP) Persemaian untuk penanganan hama dan penyakit hutan. 2. Standard Operating Prosedurs (SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan 3. Standard Operating Prosedurs (SOP) Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan 4. Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Perambahan 5. Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Illegal Logging 6. Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Perburuan Satwa Liar Dokumen-dokumen prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen (telah disahkan oleh para pejabat yang berwenang), prosedur kerja mencakup urutan kerja yang cukup terorganisir dan sistematis, mudah diterjemahkan dll).
	3.2.2.	Sedang	PT. TYE telah memiliki sejumlah sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Namun selain jumlahnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, sarana pemadam kebakaran hutan penyediaan jenis dan jumlahnya belum seimbang dengan luas areal Pemegang Izin.
	3.2.3.	Sedang	Tenaga Teknis (GANIS) yang relevan dengan perlindungan hutan adalah GANIS BINHUT (BINHUT, KELING dan KESOS). Adapun keberadaan tenaga GANIS BINHUT dan yang disesuaikan (sarjana kehutanan dan/atau berpengalaman) yang tersedia sebanyak 6 orang. Dengan demikian, pemenuhannya terhadap PERDIRJEN BPK No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah $(6 : 9) * 100 \% = 66,67 \%$
	3.2.4	Baik	PT. TYE telah mendokumentasikan beberapa kegiatan pengamanan hutan melalui dokumen Laporan Patroli Pengamanan Hutan. Hasil telaah dokumen tersebut diketahui bahwa selama kegiatan perlindungan tersebut ditemukan sejumlah gangguan seperti yang ditemukan oleh tim auditor selama observasi lapangan. Selain merinci jenis temuan gangguan, dokumen ini juga menjelaskan tindakan yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan. Mencermati hasil temuan - hasil temuan seperti telah diuraikan diatas, maka tindakan perlindungan yang telah dilakukan PT. TYE telah mencakup kegiatan yang bersifat preemptif, preventif dan represif dengan mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada
3.3. Baik	3.3.1	Baik	PT. TYE telah menyusun dokumen baru terkait prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur mencakup seluruh kegiatan kelola dan pemantauan dampak dan telah memenuhi aspek legal dokumen serta cukup aplikatif.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.3.2	Sedang	Dokumen RKL-RPL PT. TYE yang disusun tahun 2009 merencanakan beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak. Adapun sarana kelola dan pemantauan dampak yang telah dimiliki Pemegang Izin berupa : mating-mating, gorong-gorong, saluran drainase dan sudetan. Adapun sarana pemantauan yang tersedia di Camp Karpas berupa OMBROMeter. Sarana-sarana yang tersedia tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan sarana kelola yang belum tersedia sebagaimana telah direncanakan adalah plot pengamatan erosi dan sedimentasi.
	3.3.3.	Sedang	Karyawan PT. TYE dengan kompetensi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 1 orang atas nama Supri Yanto (KASIE PERSEMAIAN). Sedangkan karyawan GANIS BINHUT lainnya atas nama Shiliang, Syamsudin dan Yushal masa berlaku Kartu GANISnya telah berakhir. Dengan demikian ke-3 karyawan tersebut dapat dikategorikan sebagai tenaga berpengalaman. Dua orang lainnya yang memiliki kualifikasi Sarjana kehutanan atas nama Lampang (Kepala Perwakilan PT. TYE Palangka Raya dan Suminto, Shut (Manager Pengusahaan Hutan PT. TYE). Dengan demikian jumlah karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT, sarjana kehutanan dan berpengalaman tersedia sebanyak 6 orang. Maka pemenuhannya terhadap PERDIRJEN BPK No. P.8/VI-SET/2009 adalah $(6 : 9) * 100 \% = 66,67 \%$.
	3.3.4	Baik	PT. TYE telah memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan yang disusun tahun 2009. Dokumen ini merinci rencana kelola dampak terhadap tanah dan air berdasarkan tahapan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sebagian besar rencana kelola dampak telah diimplementasikan, namun masih terdapat 1 rencana yang sampai saat ini belum terlaksana yaitu pemanfaatan pupuk secara berimbang untuk meningkatkan kesuburan tanah dan daya dukung lahan sebagai media pertumbuhan tanaman industri.
	3.3.5	Sedang	Rencana Pemantauan Dampak PT. TYE dirinci pada dokumen RPL yang disusun tahun 2009. Secara garis besar rencana pemantauan berupa : pemantauan fisika dan kimia tanah, pendugaan besaran erosi (TBE), pemantauan curah hujan dan pemantauan terhadap fisika dan kimia air permukaan (air sungai). Adapun tindak pemantauan yang telah dilakukan berupa : pemantauan curah hujan dan pemantauan fisika dan kimia tanah. Dengan demikian, rencana pemantauan yang belum terlaksana adalah : 1). Pendugaan erosi tanah dan 2). Pemantauan fisika dan kimia air sungai.
	3.3.6	Baik	Hasil pemantauan tanah secara laboratoris tidak banyak berbeda dengan kondisi rona awal seperti yang dirinci pada dokumen ANDAL PT. TYE tahun 2009. Sedangkan hasil observasi lapangan, tanda-tanda dampak seperti erosi tidak ditemukan. Hal ini disebabkan areal kerja PT. TYE relatif datar dan pembukaan lahan baru (land clearing) untuk pembangunann HTI belum banyak dilakukan. Pencemaran air sungai oleh bahan polutan pupuk maupun aktifitas bengkel dan sisa limbah rumah tangga ditengarai tidak signifikan. Hal ini disebabkan pemakaian pupuk untuk pemeliharaan tanaman sejauh ini belum dilakukan. Sedangkan aktifitas bengkel jaraknya cukupjauh dari sungai dan limbah rumah tangga dikelola sedemikian rupa dengan menimbun pada titik tertentu.
3.4. Baik	3.4.1.	Baik	PT. TYE menyusun dokumen SOP identifikasi yang mencakup seluruh potensi flora dan fauna yang ada di areal kerja PT. TYE. Dokumen- dokumen prosedur terbut telah memenuhi aspek legal dokumen, disertai dengan acuan peratauran yang berlaku untuk menjamin validitas out put data dan alur prosedur kerja cukup jelas.
	3.4.2	Baik	PT. TYE telah menyusun potensi jenis flora dan fauna berdasarkan status perlindungan berdasarkan peraturan nasional yaitu PPRI No 7 tahun 1999 tentang PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA dan tingkat kerawanan jenis berdasarkan Red List IUCN dan CITES terbaru.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
3.5 Baik	3.5.1	Baik	<p>Prosedur pengelolaan flora yang telah dimiliki PT. TYE berupa :1). Penetapan Kawasan Lindung; 2). Pembuatan KPPN; 3). Pengelolaan Flora dan Fauna Yang Dilindungi; 4). Pemantauan Vegetasi; 5). Identifikasi Flora Dilindungi; 6). Penanggulangan Perambahan dan; 7). Penanggulangan Illegal Logging.</p> <p>Dokumen-dokumen prosedur tersebut mencakup seluruh tindak kelola untuk seluruh jenis flora dan telah memenuhi aspek legal dokumen (ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang) dan tahapan prosedur kerja yang disusun cukup sistematis, terorganisir dan aplikatif)</p>
	3.5.2	Baik	<p>Kegiatan pengelolaan flora PT. TYE mencakup kegiatan pengelolaan habitat seperti penentuan dan pengalokasian jenis kawasan lindung pada dokumen perencanaan perusahaan, penandaan kawasan lindung dengan pemasangan papan nama kawasan dan penataan batas, penyusunan dokumen prosedur pengelolaan (sebagian dari prosedur yang seharusnya tersedia) dan pengamanan hutan serta identifikasi status perlindungan jenis berdasar peraturan nasional dan tingkat kerawanan jenis berdasarkan Red List IUCN dan CITES.</p>
	3.5.3	Sedang	<p>PT. TYE belum mengelola (mendata) potensi jenis flora yang ada di areal KPPN dan kawasan lainnya yang ditunjuk sebagai kawasan lindung alami/habitat flora. Dengan demikian, tolok ukur kondisi (kecenderungan kelimpahan) tidak dapat ditentukan atas hal tersebut.</p> <p>Sementara itu, gangguan yang berpotensi mengancam kondisi spesies (keberadaan dan kelimpahan) cukup beragam mulai dari gangguan perambahan, penebangan liar dan kebakaran hutan sampai dengan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa sebagian dari jenis flora yang dilindungi kondisinya tidak aman (terancam).</p>
3.6 Baik	3.6.1	Baik	<p>PT. TYE telah menyusun dokumen prosedur pengelola yang mencakup seluruh tindak kelola untuk seluruh jenis fauna. Dokumen tersebut berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standard Operating Prosedurs (SOP) Penetapan Kawasan Lindung. 2. Standard Operating Prosedurs (SOP) Pembuatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah. 3. Standard Operating Prosedurs (SOP) Pengelolaan Flora dan Fauna Yang Dilindungi. 4. Standard Operating Prosedurs (SOP) Pemantauan Satwa Liar. 5. Standard Operating Prosedurs (SOP) Identifikasi Fauna Dilindungi. 6. Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Perambahan 7. Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Illegal Logging. 8. Standard Operating Procedures (SOP) Penanggulangan Perburuan Satwa Liar. <p>Dokumen yang tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen, prosedur keranya cukup aplikatif dan sistematis dan mencakup seluruh jenis fauna yang dikategorikan dilindungi dan rawan.</p>
	3.6.2	Baik	<p>Terdapat bukti implementasi atau tindak kelola untuk seluruh jenis fauna yang dikategorikan dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik. Tindak kelola tersebut meliputi kelola habitat dan perlindungan jenis-jenis tersebut yaitu dengan : penyusunan prosedur kerja, alokasi sebagian areal sebagai kawasan lindung (habitat), pengamanan hutan dan identifikasi perlindungan dan kerawanan jenis.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.6.3	Sedang	Terdapat beberapa gangguan yang mengancam keberadaan dan kelimpahan jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Terhadap gangguan tersebut, pihak PT. TYE telah berupaya menanggulangnya. Kondisi (kelimpahan dan kecenderungannya) spesies tersebut hingga saat ini belum diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan PT. TYE belum melakukan kajian terhadap kondisinya.
D. Kriteria Sosial			
4.1 Sedang	4.1.1.	Sedang	PT. TYE telah memiliki dokumen yang menunjukkan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar area kerja PT. TYE. Dokumen yang disusun terdiri dari : Dokumen AMDAL, RKUPHHK HTI dan Revisi RKUPHHK HTI tahun 2010-2020 , BKT 2010, RKTUPHHK HTI tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015. Dokumen yang ada telah memuat dengan lengkap identifikasi masyarakat setempat yang menjadi sasaran kegiatan desa yang terkait dengan perencanaan pemanfaatan terhadap sumber daya hutan dan alam yang ada di sekitar area kerja PT. TYE. Dokumen juga telah memuat rencana kerja PT. TYE terkait keberadaan masyarakat sekitar area kerja, yang berupa program tanaman kehidupan dan kelestarian fungsi sosial. Sesuai SK IUPHHK-HT PT.TYE, data wilayah administrasi dan kependudukan telah lengkap. Namun perkembangan adanya perubahan peta KHP sebagaimana Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. 529/Kpts- II/2012, Tanggal 25 September 2012), menunjukkan bahwa data yang termuat masih belum lengkap, karena sebagian area kerja PT. TYE masuk wilayah Kota Palangkaraya.
	4.1.2.	Baik	Penataan batas area kerja PT. TYE saat ini sedang dilakukan dengan menyertakan perwakilan intansi terkait dan wakil masyarakat sekitar (berasal dari Tumbang Miwan, Pilang Munduk dan Tumbang Empas). PT. TYE telah memiliki mekanisme untuk penataan batas lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam areal kerja perusahaan dan mekanisme penyelesaian konflik untuk penataan batas. Mekanisme yang ada telah diketahui oleh pihak –pihak terkait di luar PT.TYE, yaitu pihak pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
	4.1.3	Sedang	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat terkait dengan proses kegiatan PT.TYE meliputi kegiatan berikut: Melakukan kegiatan berladang; Mengumpulkan hasil hutan kayu dan non kayu; Berburu; Menangkap ikan; Penguasaan hak atas lahan secara komunal. PT. TYE telah memiliki mekanisme yang telah diakui oleh pihak pihak terkait dengan adanya SK Bupati Gunung Mas no. 123 tahun 2013, serta prosedur PT.TYE berupa SOP Meningkatkan Akses Masyarakat ke dalam hutan. Mekanisme dan prosedur yang ada dapat diimplementasikan sesuai dengan kegiatan masyarakat di dalam area kerja PT. TYE, walaupun hasilnya tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan.
	4.1.4	Sedang	Tata batas area kerja PT. TYE saat ini sedang dilakukan oleh tim konsultan pelaksana dengan anggota tim yang mewakili pihak-pihak terkait. Adapun batas antara areal kerja efektif PT. TYE dengan lahan garapan masyarakat yang berada dalam area PT. TYE dapat dilihat tanda batasnya berupa tanaman-tanaman yang dijadikan komoditi utama mereka. PT. TYE telah melakukan identifikasi areal kerja PT. TYE yang menjadi kawasan bertani masyarakat sekitar dalam peta. Batas antara lahan yang digarap masyarakat yang berada di dalam area kerja PT. TYE dapat dilihat dari batas lahan yang ditanami tanaman pertanian. Identifikasi penguasaan lahan oleh masyarakat sekitar PT. TYE baru meliputi area kerja PT. TYE yang berada di Kabupaten Gunung Mas.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.1.5	Sedang	<p>Batas areal kerja PT. TYE telah terdapat diketahui oleh masyarakat setempat dari tanda-tanda batas di lapangan. Hal tersebut didukung dengan sedang dilakukan penataan batas areal kerja oleh tim konsultan dan wakil pihak terkait.</p> <p>Masih terdapat masalah terkait lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang berada di dalam areal kerja PT. TYE yang sudah ada sebelum PT. TYE beroperasi. Identifikasi penguasaan lahan hanya meliputi wilayah administrative Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>Potensi konflik terkait klaim lahan oleh masyarakat cukup besar, namun selama ini konflik yang muncul terkait lahan garapan dapat dikelola dan diselesaikan oleh PT.TYE.</p>
4.2 Sedang	4.2.1	Baik	<p>PT.TYE telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan berupa Revisi RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK HTI 2011-2015 dan RKL-RPL yang memuat rencana kegiatan kelola sosial. Detail kegiatan kelola sosial yang termuat mengacu pada tanggungjawab sosial yang termuat dalam SK IUPHHK HTI.</p>
	4.2.2.	Sedang	<p>Mekanisme yang ada pada PT. TYE untuk pemenuhan tanggung jawab sosial mengacu pada hasil musyawarah yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2015 dengan Desa Tumpang Empas, Desa Pilang dan Desa Tuyun. Secara umum kegiatan CSR PT. TYE mengacu pada SK Bupati Gunung Mas no. 213 tahun 2013. Perencanaan kegiatan PT. TYE untuk pemenuhan kewajiban kelola sosial disusun berdasar usulan yang diajukan masyarakat melalui proposal kepada PT.TYE.</p> <p>Namun mekanisme pemenuhan kewajiban PT. TYE berupa tanaman kehidupan belum dapat diimplementasikan di lapangan.</p>
	4.2.3.	Sedang	<p>Pelaksanaan sosialisasi kegiatan CSR PT.TYE terkait kewajiban sosial perusahaan sebagai pemegang izin IUPHHK HT dilakukan dengan difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dalam kegiatan tersebut termuat hak-hak dan kewajiban PT. TYE sebagai pemegang izin IUPHHK HT. Kegiatan juga menghasilkan kesepakatan atas kegiatan CSR PT. TYE terhadap masyarakat sekitar area kerja di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Sosialisasi kegiatan belum dilakukan untuk masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya.</p>
	4.2.4.	Sedang	<p>Kegiatan kelola sosial oleh PT.TYE secara keseluruhan telah terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumentasi. Namun masih belum seluruh rencana kegiatan CSR yang disepakati oleh PT. TYE, Pemerintah dan masyarakat dapat diimplementasikan. Terutama implementasi areal kerja untuk tanaman kehidupan.</p>
	4.2.5	Sedang	<p>Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT.TYE telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara, dokumen penyerahan bantuan dan laporan pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait. Masing-masing laporan telah memuat kegiatan pelaksanaan kelola sosial/CSR PT.TYE.</p> <p>PT. TYE juga telah menyusun rekapitulasi kegiatan CSR yang dilakukan secara periodic (1 tahun).</p>
4.3. Sedang	4.3.1	Baik	<p>PT.TYE telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya dalam dokumen AMDAL yang disusun pada tahun 2009. Dokumen yang ada didukung oleh SK Bupati Gunung Mas no. 213 tahun 2013 yang menunjuk desa sekitar PT. TYE yang menjadi binaan PT. TYE adalah desa Tumbang Empas, Desa Tuyun dan Desa Pilang Munduk.</p>
	4.3.2	Sedang	<p>PT.TYE telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang tertuang dalam dokumen perencanaan perusahaan berupa RKUPHHK-HTI, Revisi RKUPHHK HTI, SOP Meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan, SK Bupati no. 213 tahun 2013.</p> <p>Diantaranya adalah mekanisme penyertaan masyarakat dalam kegiatan PT. TYE, kemitraan, kerja sama koperasi, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan realisasi tanaman kehidupan.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.3.3.	Sedang	PT. TYE telah menyusun rencana kegiatan CSR dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HTI, Revisi RKUPHHK HTI, RKTUPHHK HTI 2011 s.d 2015 dan RKAP tahun 2013 s.d. 2015. Namun perencanaan yang ada belum lengkap dan jelas.
	4.3.4	Sedang	PT.TYE telah melaksanakan sebagian kegiatan CSR sesuai yang dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan perusahaan. Sebagian kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar adalah kemitraan usaha, penyertaan tenaga kerja lokal, bantuan sarana dan prasarana umum desa, kerja sama dengan koperasi setempat. Adapun rencana yang masih belum terealisasi adalah kegiatan tanaman kehidupan dan peningkatan SDM.
	4.3.5	Baik	Pelaksanaan kegiatan PT.TYE terkait dengan distribusi manfaat kepada para pihak menunjukkan bahwa pihak penerima distribusi adalah masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi kegiatan tertuang dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan dan bukti setor kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disampaikan kepada instansi terkait.
4.4. Sedang	4.4.1	Sedang	PT.TYE telah memiliki mekanisme resolusi konflik berdasarkan SK Bupati Gunung Mas nomor 198 tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah antara Perusahaan Pemegang Ijin Lokasi dengan masyarakat. Mekanisme yang ada telah memuat penanggungjawab, penyelesaian, proses mediasi. PT. TYE belum memiliki prosedur internal untuk mekanisme penyelesaian konflik secara umum sebagai acuan bagi pelaksana di lapangan.
	4.4.2	Sedang	PT.TYE telah membuat peta potensi konflik, yang dituangkan dalam Peta Potensi Konflik. Peta telah memuat potensi konflik yang disebabkan oleh keberadaan lahan garapan masyarakat dalam areal kerja, PT.TYE juga telah mengidentifikasi adanya konflik dikarenakan alokasi areal tanaman kehidupan oleh perusahaan dalam areal kerja yang tidak dapat dijadikan lokasi tanaman kehidupan. Namun peta belum memuat potensi konflik yang mungkin muncul dari area kerja PT. TYE yang masuk wilayah Kota Palangkaraya
	4.4.3	Sedang	PT. TYE telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan HTI perusahaan. Kelembagaan yang dibentuk terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas jika memerlukan mediasi lebih lanjut. Proses penyelesaian permasalahan lahan garapan dalam areal kerja dan kompensasi hak adat oleh PT. TYE menunjukkan bahwa kelembagaan resolusi konflik yang ada dapat menjalankan tugasnya dengan didukung pendanaan operasional dari perusahaan yang cukup. Namun kelembagaan baru melibatkan sebagian pihak terkait.
	4.4.4	Baik	Dokumen proses penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar yang terjadi terkait permasalahan yang ada cukup lengkap dan jelas, yaitu berupa Berita Acara Penyelesaian, Surat Pernyataan, dokumen surat- menyurat, nota kesepakatan atas proses penyelesaian klaim lahan yang terekam dalam periode 2010 – 2015 tersedia cukup lengkap sesuai dengan kronologis penyelesaian.
4.5 Baik	4.5.1.	Baik	PT. TYE telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi terkait. Peraturan yang ada secara umum dapat diterapkan pada seluruh karyawan dalam perusahaan. Telaah terhadap isi dokumen dan hasil wawancara menunjukkan bahwa PT. TYE telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam peraturan diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotaan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan serta penyertaan karyawan pada jamsostek.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.5.2	Sedang	PT. TYE telah merencanakan pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang bersifat teknis kehutanan. Pengembangan kompetensi personel diluar bidang teknis kehutanan belum diprioritaskan.
	4.5.3.	Baik	PT. TYE telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat prosedur. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait penilaian karyawan yang terdokumentasi.
	4.5.4.	Sedang	PT. TYE telah memenuhi sebagian kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan sebagaimana dalam lampiran SK IUPHHK HT . Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan karyawan telah merupakan implementasi dari beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan, yang meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan dan K3. Implementasi K3 sebagian besar telah dilaksanakan sesuai prosedur yang dimiliki oleh PT. TYE. Namun masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai prosedur seharusnya.

2.2 Resume Hasil Penilaian VLK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Argumen
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 dan telah dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala 1 : 250.000 yang sesuai dengan fungsi kawasannya.
			1.1.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
			1.1.1.C	Memenuhi	Terdapat data dan informasi terkait pembuatan jalan kabupaten yang menghubungkan Sepang – Takaras yang memotong Kawasan Lindung (KPPN) sesuai dengan surat permohonan penjelasan dengan nomor : 85/TE-HTI/PLK/XI/2015 tanggal 16 November 2015 kepada dinas kehutanan dan dinas pekerjaan umum Kabupaten Gunung Mas.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2010 - 2019, RKTUPHHK-HTI tahun 2014 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2015 beserta peta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
			2.1.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK berupa KPPN, KPSSL dan Sempadan Sungai dan dapat dibuktikan di lapangan.
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2014 dan 2015 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2010-2019 yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.2.1 b			Memenuhi	Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI dengan kenyataan di lapangan.	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Argumen
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian.
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen legal yang ada (SKSKB dan FA-KB). Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LM-KB dan LM-KBK dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSKB dan FA-KB (pengurangan) menunjukkan kesesuaian.
		3.1.3	3.1.3 a	N/A	Tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TYE merupakan pemegang IUPHHK-HT.
			3.1.3 b	N/A	Tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TYE merupakan pemegang IUPHHK-HT.
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen SKSKB dan FA-KB lengkap dan sah serta tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, DR dan PNT yang diterbitkan periode November 2014-Oktober 2015 sesuai dengan LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume, maupun tarifnya.
			3.2.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah melunasi pembayaran PSDH, DR dan PNT beserta tunggakan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran untuk periode November 2014 -Oktober 2015 dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan.
			3.2.1 c	Memenuhi	PT. TYE telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH, DR dan PNT dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
	3.3	3.3.1	3.3.1.	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Rekomendasi PKAPT dengan Nomor : 518/548/Koperindag/Dag/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Seluruh kapal pengangkut kayu memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari syahbandar dan berbendera Indonesia.
	3.4	3.4.1	3.4.1	N/A	Tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TYE belum menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada dokumen/lampiran dokumen dikarenakan baru memperoleh sertifikat VLK yang berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2015.
4	4.1	4.1.1	4.1.1	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Proses penyusunan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya sesuai yang tertuang dalam dokumen ANDAL.
			4.1.2 b	Memenuhi	Terdapat implementasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial sesuai dokumen ANDAL.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen terkait K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
			5.1.1.b	Memenuhi	Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan karyawan dan berfungsi dengan baik.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhihan	Argumen
			5.1.1 c	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3.
	5.2	5.2.1	5.2.1.a	Memenuhi	PT. TYE tidak memiliki serikat pekerja namun terdapat Surat pernyataan nomor : 003/TE-HTI/SP/PLK/V/2015 tanggal 1 Agustus 2015 yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan PT. TYE dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja dan memberikan fasilitas, waktu, tempat sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		5.2.2	5.2.2.	Memenuhi	Terdapat dokumen peraturan Perusahaan (PP) tanggal 30 Oktober 2015 dan berlaku sampai dengan 5 November 2016 serta telah didaftarkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas dengan nomor : SK.560/61/DSTKT/XI/2015 tanggal 5 November 2015.
		5.2.3	5.2.3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Administrasi Umum dan Personalia Bulan Oktober 2015 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan PT. TYE berjumlah 102 orang dan tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur